

ASEAN harus mengambil sikap yang lebih kuat di luar Konsensus Lima Poin, kata anggota parlemen Asia Tenggara

JAKARTA, 24 April 2023 - Pada peringatan dua tahun Konsensus Lima Poin, anggota parlemen dari Asia Tenggara meminta ASEAN untuk mengakui bahwa Konsensus yang ditandatangani pada April 2021 telah gagal total dan bahwa junta Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing tidak bisa dipercaya untuk memenuhi kewajiban yang diuraikan dalam perjanjian tersebut.

“Serangan udara yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sagaing, dan menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak, adalah bukti lebih lanjut bahwa junta Myanmar sama sekali tidak mau dan tidak mampu mematuhi Konsensus Lima Poin,” kata Ketua ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dan anggota DPR RI Mercy Barends hari ini. “Jika ASEAN bersikeras untuk berpegang pada kesepakatan yang telah terbukti sama sekali tidak efektif, maka ASEAN ikut bertanggung jawab atas kejahatan dan kekejaman junta yang sedang berlangsung.”

Pada 24 April 2021, para pemimpin sembilan negara anggota ASEAN dan kepala junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menyepakati lima poin berikut: penghentian kekerasan di negara tersebut; dialog di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; bantuan kemanusiaan oleh ASEAN; dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Penyelidikan Parlemen Internasional tentang tanggapan global terhadap kudeta Myanmar (IPI), yang diorganisir oleh APHR, menulis dalam laporan akhirnya pada November 2022, “jelas bahwa Konsensus Five-Point telah gagal, dan cara baru keterlibatan dibutuhkan di tempatnya.” Seperti yang dikatakan oleh seorang saksi dalam kesaksiannya kepada IPI, sejak awal, “sangat jelas bahwa Min Aung Hlaing tidak tulus menandatangani dan tidak berniat mengikutinya.”

Poin pertama Konsensus tentang penghentian kekerasan telah diabaikan secara terang-terangan oleh junta, sebagaimana dibuktikan dengan serangan udara dan serangan keji yang terus berlanjut terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Sementara itu, niat ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan, sebagaimana dicatat dalam laporan IPI, “dihalangi oleh kurangnya sumber daya dan komitmen yang tulus.” Posisi Utusan Khusus ASEAN juga terbukti tidak efektif, apalagi seiring dengan pergantian ketua ASEAN.

“Pendekatan melempem ASEAN terhadap junta benar-benar memalukan. Bahkan setelah akhirnya mengkritik serangan udara junta di Sagaing, Sekretaris Jenderal ASEAN masih bertemu dengan perwakilan tetap junta untuk ASEAN, yang membuat pernyataan kecaman



tidak lebih dari kata-kata kosong,” kata Co-chair APHR dan mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago. “Pendekatan ‘diplomasi lunak’ Indonesia sebagai ketua ASEAN juga belum membuahkan hasil dan harus segera dievaluasi kembali. Indonesia harus mengambil sikap yang lebih kuat dan transparan tentang bagaimana mereka menangani krisis Myanmar, terutama mengingat terbatasnya waktu yang tersisa dalam kepemimpinan mereka.”

Dalam diskusi meja bundar yang diadakan di Gedung DPR RI di Jakarta pada 3 Maret lalu, belasan anggota parlemen dari beberapa negara Asia Tenggara mendesak ASEAN dan masyarakat internasional pada umumnya untuk mengambil tindakan cepat dan nyata terhadap junta militer ilegal yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing, serta memberikan bantuan nyata kepada kekuatan pro-demokrasi di Myanmar, termasuk dengan mengakui Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan melakukan negosiasi terbuka dan publik yang mencakup NUG, kelompok etnis, dan kekuatan pro-demokrasi lainnya.

“ASEAN perlu menjalankan perannya sebagai mediator regional dan perlu menjalankannya segera, dimulai dengan Indonesia sebagai ketua. Pertemuan tertutup dan informal tidak lagi cukup,” kata Santiago. “Jelas bahwa ASEAN perlu merundingkan perjanjian baru yang mencakup NUG dan perwakilan etnis minoritas sambil memberikan mekanisme penegakan yang jelas untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut ditegakkan.”